

BAB III

MENGGALI PROBLEM DI BALIK TANGGUL LUMPUR

A. Alam (Kami) Yang Pincang

Bencana lumpur lapindo menyisahkan persoalan yang berkepanjangan dan mencakup segala aspek bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Problem lingkungan nyatanya menjadi focus utama yang harus diselesaikan. Sebelum membahas lebih jauh problem lingkungan tersebut, data dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menunjukkan bahwa Desa Ketapang merupakan salah satu wilayah kritis yang terkena dampak semburan lumpur.

Tabel 8

Dampak Semburan Lumpur Lapindo di Desa Ketapang¹

No.	KONDISI	HASIL SURVEI	KETERANGAN
1	Emisi semburan dan bubble	Hydrocarbon 115000-441200 ppm, Ambang batas 500 ppm	Sudah jauh melebihi ambang batas
2	Pencemaran udara	Hidrocarbon 2128-55000 ppm, Ambang batas 0,24 ppm	Sudah jauh melebihi ambang batas
3	Air sumur	Zat Pdt, Fe, Mn, Cl, Cd, KMnO ₄ >BM	Tidak layak untuk MCK
4	Penurunan tanah	60 – 100 m	Mengakibatkan kerusakan bangunan
5	Kerusakan yan dapat mengancam keamanan bagi para penghuninya	56 rumah dari 255 rumah yang ada, telah ditinggalkan oleh penghuninya	Yang dilihat adalah: kerusakan atap, dinding dan lantai
6	Keluhan terhadap pencemaran gas, pencemaran air, gangguan kesehatan dan ancaman banjir	Sesak nafas, mual, batuk, pusing, gatal-gatal.	Tidak layak huni Perlu segera dievakuasi

¹ Data BPLS tahun 2012

Potensi alam di Desa Ketapang sudah mengalami disfungsi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat semenjak bencana lumpur lapindo ada. Tanah persawahan yang pada awalnya menjadi salah satu sumber mata pencaharian warga kini sudah menjadi lahan kering yang rentan terbakar setiap musim kemarau. Meski sesekali warga menancapkan bibit kacang hijau dengan aliran air yang bercampur lumpur.



Gambar 6 . Peta Terdampak Lumpur Lapindo

Garis biru pada gambar menunjukkan bahwa area tersebut merupakan area yang sangat rawan dengan dampak dari bencana lumpur lapindo. Dampak-dampak tersebut sangat mengancam bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Warna jingga menunjukkan wilayah yang tenggelam karena lumpur yang paling awal, yang berwarna merah merupakan dampak lumpur lapindo pasca semburan yang pertama. Sedangkan yang warna kuning merupakan lahan yang baru saja terkena dampak semburan lumpur, warna kuning merupakan Desa Glagaharum yang tenggelam pada tahun 2009.

Bencana ini memang akan terus meluas mengingat volume yang semakin meningkat setiap harinya yakni 500 kubik/hari. Untuk daerah diluar dari warna pada gambar diatas pun juga mengalami dampak yang cukup signifikan. Seperti di Desa Siring, Desa Ketapang dan Desa Gempolsari yang mengalami penurunan tanah hingga 5 cm per harinya, kemudian muncul gelembung-gelembung gas di lahan persawahan, lahan berair di pekarangan rumah dan di sungai yang mengalir di desa tersebut. Tidak sedikit pula yang muncul titik-titik api di lahan kosong ataupun di pekarangan rumah. Biasanya warga memanfaatkannya untuk memasak air. Selain itu lumpur juga berpengaruh pada kualitas air dan udara di desa yang masuk dalam peta terdampak lumpur. Sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

Pemenuhan kebutuhan airpun menjadi permasalahan yang tidak kalah ekstrimnya. Air sungai yang kini berubah menjadi selokan hanya menampung endapan-endapan cairan pekat, hal ini merupakan rantai penghubung dari kali porong yang akhir-akhir ini menjadi sarana pembuangan lumpur agar volumenya tidak meninggi. Maka masyarakat harus menghadapi krisis air bersih. Tidak sedikit dari warga yang harus mengidap penyakit kulit karena kandungan kimia dalam air.

Pemerintah memang sudah menyediakan tandon-tandon air bersih yang diisi setiap minggu pada posko-posko di tiap-tiap RT. Namun air yang hanya 2500liter tidak cukup untuk menghidupi berpuluh-puluh KK, sebagai contoh di RT.3 RW.1 yang dihuni oleh 43 KK yang terdiri dari hampir 540 orang yang kesemuanya membutuhkan air bersih untuk mandi, memasak dan buang air. Pada

akhirnya warga mengandalkan sokongan air dari pedagang air keliling dengan harga 2000 per 1 drum. Air 1 drum ini digunakan untuk 1-2 hari sehingga setiap bulannya warga harus menyediakan Rp.30.000,-. Air ini dimanfaatkan untuk kebutuhan masak dan minum saja, sedangkan untuk mandi dan buang air mereka harus memanfaatkan air sumur.



Gambar 7 . Kondisi Sumur “Bubbles” Warga

Problem lingkungan ini tidak akan berhenti sampai lumpur tidak lagi mengepulkan asap putih ke angkasa. Karena diprediksikan lumpur ini akan membentuk sebuah gundukan mirip gunung berapi ditinjau dari sebab-akibat. Pengaruhnya untuk wilayah-wilayah di sekitarnya dipastikan akan mengalami penurunan tanah secara *kontinyu*. Selain itu kandungan gas yang ada di wilayah-wilayah terdampak ini berpengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat. Karena udara di desa ini mengandung Hidrokarbon 2128-55000ppm diatas ambang batas, sehingga resiko bencana menjadi bahasan yang diperhitungkan.

Tabel 9

Resiko Bencana di Areal Desa Terdampak Lumpur²

Jenis Ancaman Bahaya	Resiko Bencana
Ancaman Bahaya Geologi 1. Tanah Ambles 2. Jebolnya tanggul penahan lumpur	Sangat Rawan Sangat Rawan
Ancaman Bahaya Iklim 1. Banjir 2. Kekeringan	Rawan Sangat Rawan
Ancaman Bahaya Lingkungan 1. Polusi 2. Rusaknya saluran air bersih 3. Wabah Penyakit 4. Gagal Panen	Sangat Rawan Sangat Rawan Sangat Rawan Rawan
Ancaman Bahaya Sosial 1. Kerusakan Budaya 2. Budaya Tidak Disiplin 3. Politik Tidak Memihak Rakyat 4. Konflik/Kerusuhan	Sangat Rawan Sangat Rawan Sangat Rawan Sangat Rawan

Kualitas tanggul penahan lumpur pun menjadi persoalan ketika musim penghujan datang karena tanggul sudah tidak mampu menampung air hujan yang akan berdampak pada kebocoran dari tanggul tersebut sewaktu-waktu.



Gambar 8. Tanggul Sempit Jebol, Masyarakat Mengevakuasi Inventaris Milik Sekolah MI. Salafiyah

² Data Survey Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2007

B. Gejolak Sosial Pasca Bencana

Persoalan sosial juga menjadi polemik penting di desa Ketapang. Pada dasarnya karakteristik masyarakat desa Ketapang merupakan masyarakat yang tradisional dengan segala pemikiran dan penyikapan terhadap kehidupannya. Masyarakat desa Ketapang juga tergolong masyarakat religius namun juga memiliki sikap pragmatis. Kehidupan yang pas-pasan dengan penghasilan rata-rata Rp.1.000.000,- per bulan nyatanya menjauhkan sebagian besar masyarakat dari kesejahteraan, sehingga peranan *bank tithil* seringkali menjadi solusi keuangan. Maka ketika desa ini dimasukkan dalam area peta terdampak, masyarakat menyambutnya dengan gembira, dengan pengharapan bahwa kehidupannya akan berjalan lebih baik. Namun nyatanya hal tersebut malah merubah gaya hidup masyarakat menjadi semakin pragmatis, dalam artian masyarakat bisa membeli segala hal yang diinginkannya akan tetapi lupa dan tidak memahami skala prioritas.

Beberapa masyarakat menggunakan uang ganti rugi awal dengan membeli hal-hal yang bersifat konsumtif saja, sedangkan memenuhi kebutuhan papan diabaikan. Muncul juga persoalan premanisme yang membongkar rumah-rumah warga yang sudah ditinggalkan pemiliknya dengan maksud agar puing-puing tersebut dapat dijual lagi.

Mobilitas sosial pada umumnya berpangkal dari faktor-faktor yang menghubungkannya dengan suatu kondisi krisis seperti bencana, ekonomi yang tidak lagi mumpuni, keinginan untuk mengubah hidup yang lebih baik, dan lain sebagainya.

Masalah lumpur lapindo hampir mematikan semua akses dan latar belakang yang menjadikan warga harus bertahan. Pemerintah bersama BPLS telah merancang untuk membayar ganti rugi secara material kepada masyarakat yang terdampak bencana dengan syarat harus meninggalkan tempat tinggal mereka yang berada dalam peta terdampak lumpur. Pemerintah mengeluarkan subsidi kepada warga dalam bentuk jatah hidup per anggota keluarga Rp.300.000,- dan Rp.2.000.000,- untuk biaya kontrak yang diturunkan setiap 6 bulan. Selain itu ganti rugi akan diangsur dalam tempo 8 bulan dengan perincian 20% dan 80%.

Iming-iming uang inilah yang mengundang permasalahan baru bagi masyarakat desa Ketapang yang umumnya tergolong sebagai masyarakat menengah ke bawah. Bayangkan saja jika satu keluarga terdiri dari 10 orang anggota maka setiap bulan mereka mendapatkan Rp.5.000.000,- sedangkan gaji mereka sebagai pekerja pabrik hanya berkisar antara Rp.1.500.000, sebagai buruh serabutan Rp.600.000,-. Sehingga masyarakat memanfaatkan uang tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sekunder.

Ganti rugi tidak menyelesaikan masalah hingga ke akarnya, itu hanyalah langkah pembungkaman yang membuat masalah seolah-olah selesai. Bagi masyarakat yang bersumber daya masih rendah hal ini tampak seperti langkah penyelesaian untuk mengembalikan tatanan hidup mereka yang timpang, namun kenyataan masalah-masalah baru yang menjadi buntut pada kenyataannya tidak kalah pelik.

Di lapangan peneliti menemukan kasus nikah-cerai atau rujuk-nikah. Mereka yang sudah bercerai memilih rujuk kembali demi mendapatkan bagian

uang. Ada pula diantara mereka yang memilih untuk tidak melanjutkan pekerjaannya sebagai buruh serabutan karena iming-iming uang yang baginya begitu banyak, masalah ini sangat rawan mengakibatkan jumlah pengangguran yang semakin meningkat mengingat latar belakang penghidupan ekonomi mereka yang bergantung pada pabrik-pabrik dan pekerjaan kasar. Akibatnya kini mereka mengalami kesusahan ketika warga harus segera meninggalkan desa. Mereka harus mencari hutangan untuk menebus harga rumah maupun kontrakan.

Padahal jika mereka mampu memanaajemen keuangannya, mereka tidak akan terperosok dalam kubang yang semakin dalam lagi. Hingga pada akhirnya masyarakat banyak yang mengidap tekanan psikis yang tidak ayal menimbulkan kematian. Sebenarnya yang paling mendasar bukan dari bagaimana memberikan ganti rugi saja, melainkan memberikan pengetahuan yang mumpuni sehingga mampu menggunakan potensi itu sebagaimana mestinya.

Semburan lumpur panas Lapindo benar-benar berhasil mengubah segala bentuk kehidupan manusia di sekitarnya. Pemiskinan dan kemiskinan mendadak atas ribuan orang yang hidup di wilayah sekitar bencana adalah tragedi kemanusiaan yang seharusnya membuat miris hati siapa saja yang masih memiliki kepekan nurani dan sosial. Semburan Lumpur Panas Lapindo merupakan salah satu bencana yang terjadi sebagai bentuk konsekwensi dari aktivitas manusia yang lalai.

C. Rentenirisasi Sebagai Jalan Keluar Dari Kepelikan Ekonomi

Hal yang paling mendasar dari persoalan ekonomi adalah adanya jaring pengaman yang mampu mengentaskan permasalahan ekonomi. Perlu

digarisbawahi bahwa sebenarnya solidaritas sosial dan dukungan masyarakat menjadi penting ketika menghadapi masalah yang pelik, namun kenyataannya hal ini cenderung memudar ketika berkaitan dengan masalah finansial.

Rentenirisasi dewasa ini membangun jaringan baru yang legal melalui sistem koperasi simpan pinjam. Umumnya mereka menawarkan tawaran yang sangat mudah (tampaknya), dengan pinjaman yang sedikit dan bunga yang sedikit (katanya). Pola oknum koperasi ini menjajaki masyarakat desa ketapang dengan model door to door, mereka juga umumnya memanfaatkan keterpurukan warga menjelang sulitnya menghadapi tatanan baru sosial akibat bencana. Padahal mereka membantai kode etik koperasi.

Ada sekitar 3 Koperasi simpan pinjam yang seringkali melibatkan masyarakat desa ketapang, yakni "Citra Abadi", "Masyarakat Mandiri" dan koperasi tanpa menggunakan nama yang jelas. Selain itu ada beberapa BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang digadag-gadag sering juga mengadakan gerilya di desa ketapang untuk mencari nasabahnya. Umumnya mereka "menjajakan" instansinya dengan mudah dalam model peminjamannya. Seperti bunga yang katanya kecil hanya berkisar 2,5-4%, syarat-syarat yang sangat mudah hanya membutuhkan foto kopi KTP dan KK serta jaminan yang mereka ajukan.

Dua hal yang sangat janggal adalah bagaimana koperasi dan BPR tersebut yang semestinya melayani kredit lunak untuk usaha mandiri masyarakat menjadi sarana pinjam-meminjam bagi masyarakat pada umumnya dengan cara yang sangat mudah? Kemudian bagaimana mereka mampu menjadikan nasabah-nasabah tersebut tetap ada tanpa memberikan predikat anggota setelah terlibat

hutang selama berbulan-bulan padahal dalam kode etik koperasi pemberian kredit lunak dalam jangka waktu 3 bulan menjadikan siapapun adalah anggota koperasi tersebut. Dan yang tidak kalah mencengangkan adalah bunga yang diajukan. Dalam sistem perkoperasian bunga yang semestinya diajukan adalah maksimal 1%, namun mereka mengajukan bunga yang tidak sedikit yakni berkisar 2,5-4%.

Ada sekitar 22 KK yang terlibat hutang kepada para oknum koperasi. Umumnya mereka berprofesi sebagai serabutan dan buruh pabrik yang istrinya hanya mengurus rumah tangga saja. Biasanya mereka hanya meminjam Rp.100.000,- s/d Rp. 500.000,- dengan bunga 2,5% saja hutang mereka menjadi Rp.125.000,- s/d Rp. 550.000,- tiap bulannya. Belum lagi mereka yang terlibat hutang lebih banyak. Padahal ketika ditanya soal kemanfaatan uang ganti rugi, Bapak Abdul Muntholib (40th) malah menuturkan bahwa uang itu dipergunakan untuk membeli sepeda motor, membayar SPP anaknya dan lain-lain.

Padahal ada potensi yang bisa digunakan sebagai "energi" ekonomi alternatif seperti adanya eksistensi industri rumahan yang dikelola hanya oleh sebagian orang saja. Seperti industri kerupuk milik Bapak Hisyam atau industri dompet dan tas oleh Ibu Djuana, namun industri mereka perlahan-lahan hampir saja gulung tikar karena kurangnya perhatian pemerintah untuk membantu meneguhkan eksistensi mereka untuk turut meminimalisir jumlah pengangguran di desa.

Industri tersebut kini memiliki pekerja hanya sekitar 9 orang dengan hasil produksi (untuk kerupuk) sekitar 30kg saja. Sedangkan untuk industri tas dan dompet hanya sekitar 6 orang pekerja yang nantinya hasil produksi mereka di

pasarkan di sentra tas tanggulangun. Mengingat semestinya industri ini mampu membuka pundi-pundi ekonomi baru malah seolah tampak tidak berguna karena kurangnya perhatian masyarakat dan pemerintah sebagai dua subyek sentral.

D. Pendidikan Anak-Anak Lumpur

Di Desa Ketapang, sarana pendidikan menjadi hal terpenting bagi kehidupan masyarakatnya terutama pada tingkatan sekolah dasar. Terdapat dua sekolah tingkat dasar dan dua sekolah taman kanak-kanak serta terdapat 1 sekolah non formal pada tingkat pendidikan anak usia dini yang dikelola oleh pemerintah desa.

Adapun sekolah tersebut yakni Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah, Sekolah Dasar Negeri Ketapang, Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita, Roudlotul Athfal Salafiyah dan PAUD Az Zahra. Selain itu terdapat beberapa lembaga pendidikan islam dan pondok pesantren yang menjadi alternatif pendidikan bagi masyarakat. Ada sekitar 4 TPQ dan 2 Pondok Pesantren yakni Pondok Pesantren Riyadhus Sholikhin yang dipimpin oleh Ust. Drs. Masyhudi, M.PdI dan Pondok Pesantren Miftakhul Huda yang dipimpin oleh K.H. Ghufroon Karim, namun pasca relokasi hanya 1 TPQ saja yang masih melakukan kegiatan belajar-mengajar dan hanya 2 sekolah tingkat dasar saja yang masih bertahan meskipun dengan jumlah siswa yang tidak banyak.



Gambar 9 . MI. Salafiyah Ketapang

Dalam mekanisme yang dicanangkan oleh PT Lapindo Brantas, fasilitas umum seperti sarana kesehatan, balai desa bahkan sekolah tidak mendapatkan ganti rugi, sehingga sekolah-sekolah yang terkena imbas dari semburan lumpur melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat nomaden yakni berpindah-pindah. MI. Salafiyah saja sempat mengungsi ke desa Kalitengah ketika tanggul di dekat desa Ketapang jebol dan menenggelamkan desa pada tahun 2008. Namun aktifitas belajar mengajar dilakukan dengan baik meskipun dengan jumlah siswa yang sedikit. Meski bangunan sekolah masih ada, namun siswa-siswanya memilih untuk pindah ke sekolah lain. Siswa yang memilih bertahan dengan jumlah sedikit adalah siswa yang keluarganya memilih untuk tetap tinggal di desa Ketapang. Hal ini yang mengakibatkan turunnya kualitas pembelajaran siswa.

Sistem pembelajaran melalui sekolah di desa Ketapang sebenarnya menjadi salah satu tolak ukur dalam menguatkan sistem sosial dan memulihkan psikis anak-anak korban lumpur akibat mobilitas yang dilakukan masyarakat

pasca relokasi. Namun karena tidak efektifnya pembelajaran yang dilakukan mengakibatkan terhambatnya proses pendidikan bagi anak-anak lumpur.

Problematika yang dihadapi oleh korban lumpur lapindo di desa Ketapang dapat disistematiskan dalam pohon masalah:

Bagan I

Pohon Masalah Problematika Korban Lumpur Pasca Relokasi di Desa

Ketapang



